



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIT KERJA** : UNIVERSITAS GADJAH MADA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : RADEN RARA ENDANG LUKITANINGSIH  
2. Jabatan : WAKIL DEKAN BIDANG KEUANGAN, ASET DAN SUMBER DAYA MANUSIA  
3. NHK : 732645

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp.** **985.450.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 170 m2/198 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000  
2. Tanah dan Bangunan Seluas 183 m2/100 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000  
3. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/45 m2 di KAB / KOTA GUNUNG KIDUL, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000  
4. Tanah Seluas 2.977 m2 di KAB / KOTA GUNUNG KIDUL, HASIL SENDIRI Rp. 115.000.000  
5. Tanah Seluas 196 m2 di KAB / KOTA KULON PROGO, HASIL SENDIRI Rp. 450.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** **Rp.** **315.500.000**

1. MOTOR, HONDA MOTOR BEAT Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 6.500.000  
2. MOBIL, HONDA CR-V RM 1 2WD 2.0 AT CKD Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 185.000.000  
3. MOBIL, HONDA MOBILIO 1.5 E CVT Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 124.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** **Rp.** **80.771.600**

**D. SURAT BERHARGA** **Rp.** **---**

**E. KAS DAN SETARA KAS** **Rp.** **312.717.899**



F. HARTA LAINNYA

Sub Total

Rp. ----  
Rp. 1.694.439.499

III. HUTANG

Rp. 203.861.500

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.490.577.999

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.